



**PENGARUH BELANJA DAERAH, TEMUAN AUDIT
DAN *SIZE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota di Indonesia)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Ardy Garini

NIM 7211410009

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jumat

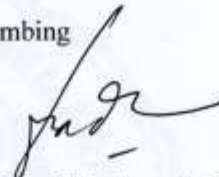
Tanggal : 10 April 2015

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi,



Drs. Fachrurrozie, M.Si.
NIP. 196206231989011001

Pembimbing



Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si.
NIP. 197905022006042001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *27 April 2015*

Penguji I




Amir Mahmud, S.Pd, M.Si
NIP.197212151998021001

Penguji II



Kiswanto, SE, M.Si
NIP.198309012008121002

Penguji III



Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si.
NIP.197905022006042001

Mengetahui
a.n Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik

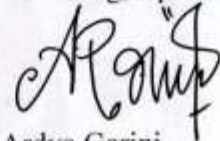


Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, April 2015



Ardy Garini
NIM 7211410009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. “Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.” (H.R. Muslim)
2. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah)

Persembahan

Dengan segenap rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk,

1. *Ayah dan Ibu tercinta, Sutarso dan Yayuk, yang selalu memberi dukungan, semangat serta doa selama menempuh studi.*
2. *Adik tersayang, Indonesia Hayu Murti, yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.*
3. *Untuk almamaterku, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga.*
4. *Untuk teman-teman Akuntansi A angkatan 2010.*
5. *Untuk anak kos Pesona Putri khususnya Kiki Wulandari*

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil'alamin...Segala Puji bagi Allah SWT atas rahmat dan pertolonganNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Pegawai Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.”

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Wahyono, M.M., yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama masa akademik.
3. Ketua Jurusan Akuntansi, Drs. Fachrurrozie, M.Si., yang telah memberikan petunjuk-petunjuk selama masa akademik.
4. Dosen Wali Akuntansi A 2010, Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. yang telah memberi pengarahan selama masa studi.
5. Dosen Pembimbing, Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si. yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membantu kelancaran studi.
7. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa kepada penulis.
8. Teman-teman Akuntansi A angkatan 2010.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati oleh penulis, demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menyumbangkan sedikit manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Semarang, April 2015
Penulis

Ardya Garini
7211410009

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Prakata.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Diagram.....	xiv
Daftar Grafik	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
Abstract	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11

BAB II	LANDASAN TEORI	13
	2.1. Teori Keagenan	13
	2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	14
	2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
	2.2.2. Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19
	2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
	2.4. Belanja Daerah	24
	2.4.1. Definisi Belanja Modal	25
	2.5. Temuan Audit.....	29
	2.5.1. Definisi Audit.....	29
	2.5.2. Tipe – tipe Audit	30
	2.5.3. Tujuan Audit Operasional	32
	2.6. <i>Size</i> (Ukuran).....	32
	2.7. Kerangka Berfikir.....	33
	2.8. Pengembangan Hipotesis	34
BAB III	METODE PENELITIAN	37
	3.1. Jenis Penelitian.....	37
	3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	37
	3.3. Jenis dan Sumber Data	38
	3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	38
	3.4.1. Variabel Dependen.....	38
	3.4.2. Variabel Independen	39
	3.5. Metode Analisis Data.....	41

	3.5.1. Analisis Deskriptif	41
	3.5.2. Analisis Inferensial	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
	4.1. Hasil Penelitian	45
	4.1.1. Statistik Deskriptif	45
	4.1.1.1. Belanja Daerah	46
	4.1.1.2. Jumlah Pegawai	48
	4.1.1.3. Temuan Audit	49
	4.1.1.4. Kinerja keuangan pemerintah daerah	50
	4.1.2. Metode Analisis Data.....	51
	4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik	51
	4.1.2.1.1. Uji Normalitas	51
	4.1.2.1.2. Uji Multikolonieritas	53
	4.1.2.1.3. Uji Heterokedastisitas.....	54
	4.1.2.2. Analisis Regresi Berganda.....	56
	4.1.2.3. Pengujian Hipotesis	58
	4.1.2.3.1. Pengujian Hipotesis secara Simultan.....	58
	4.1.2.3.2. Pengujian Hipotesis secara Parsial	59
	4.1.2.3.3. Koefisien Determinasi Ganda.....	61
	4.1.2.3.4. Koefisien Determinasi Parsial	62
	4.2. Pembahasan	63

4.2.1. Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja	
keuangan daerah	63
4.2.2. Pengaruh temuan audit terhadap kinerja	
keuangan daerah	65
4.2.3. Pengaruh jumlah pegawai terhadap kinerja	
keuangan daerah	65
BAB V	
PENUTUP	67
5.1. Simpulan	67
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Deskripsi Statistika Variabel Penelitian.....	45
Tabel 4.2 Deskripsi Persentasi Sebaran Belanja Daerah	46
Tabel 4.3 Deskriptif Persentasi Sebaran Jumlah Pegawai	48
Tabel 4.4 Deskriptif Persentasi Sebaran Temuan Audit	49
Tabel 4.5 Deskriptif Persentasi Sebaran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	50
Tabel 4.6 Uji Normalitas Data	52
Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas.....	54
Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas	56
Tabel 4.9 Analisis Regresi Berganda	57
Tabel 4.10 Uji Simultan	59
Tabel 4.11 Uji Parsial.....	60
Tabel 4.12 Uji Determinasi Simultan.....	61
Tabel 4.13 Uji Determinasi Parsial	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	33

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Belanja Daerah.....	47
Diagram 4.2 Jumlah Pegawai.....	49
Diagram 4.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Normal PP-Plot	53
Grafik 4.2 Grafik Scatteplot.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian.....	72
Lampiran 2 Output SPSS	73
Lampiran 3 Temuan Audit.....	79

ABSTRAK

Garini, Ardy : 2015. “*Pengaruh Belanja Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Pegawai Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* “. Skripsi. Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing: Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si.

Katakunci: Belanja Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Pegawai Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah dalam pelaksanaan misi otonomi daerah. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Belanja Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Pegawai merupakan aspek yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah belanja daerah, temuan audit dan jumlah pegawai memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun secara simultan? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Pegawai terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun secara simultan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 33 provinsi di Indonesia, penelitian ini termasuk jenis *judgement-sampling*, jenis data yang diperoleh merupakan data sekunder, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah, temuan audit dan jumlah pegawai memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun secara simultan, besarnya pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 37,9%. Dari ketiga variabel tersebut belanja daerah merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan daerah, pelaporan input output keuangan daerah yang boleh dipublikasikan sebaiknya dipublikasikan guna menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah sehingga temuan-temuan audit yang berupa kasus-kasus keuangan dapat ditekan sedemikian rupa, untuk penelitian selanjutnya jika menggunakan variabel jumlah pegawai, sebaiknya diukur menggunakan proporsi, yaitu dengan membagi jumlah banyak pegawai negeri dalam satu provinsi dibagi banyaknya penduduk di provinsi tersebut, agar sebaran nilainya lebih merata.

ABSTRACT

Garini, Ardya : 2015. “*Region Expense influence, Finding Audits and Total Clerk to Local Government financial Performance at Indonesian*“. Paper. Developments Economic majors. Economic faculty. Semarang Country University. I. Counselor: Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si.

Keyword: Region expense, Finding Audits and Total Clerk to Local Government financial Performance.

Local governments are requested to invent a system of management that is incapable of supporting operational of regional development in the implementation of regional autonomy mission. Performance measurement is a component that is essential because it will be giving them feedback over the plan that has been implemented. Regional spending, the findings of an audit and the number of employees is the suspects with the effect on regional financial performance. Highlights the difficulty in this study is whether regional spending, the findings of an audit and the number of employees has an effect on the performance of the local government finance both in partial and simultaneously? . An objective in this research is to know the influence of regional spending, the findings of an audit and the number of employees of the performance of the local government finance both in partial and simultaneously.

Population in this study were 33 provinces in Indonesia, this research including *judgement-sampling*, the kind of data obtained is secondary data, data analysis technique in this research using double regression analysis .

Research results show that the regional expenditure, audit findings and number of employees have influence on the performance of the local government finance both a partial and simultaneously third the size of the influence of the independent variable on the performance of the local government finance is 37,9%. From third variables such regional expenditure is variable that have the biggest impact on the performance of government financial.

Advice that can be given in this research is in order improve the performance of regional finance, reporting input output local financial may be published should be published in order to ensure accountability and financial transparency region so that the findings of audit in the form of financial cases can be suppressed in such a way for the next research if they use the variables the number of civil servants should be measured using proportions, namely by dividing the total number of many civil servants in each province divided number of residents in the province to scatter to value more evenly.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 1997 mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenang untuk pengelolaan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan dapat membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri (Azhar,2008). Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang terbaik bagi daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah dapat terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No.22 dan 25 tahun 1999 kemudian di revisi melalui UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009).

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan

peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Kenyataannya yang terjadi adalah kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia (Adi, 2006). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap pembangunan ekonomi yang hanya berkebutuhan di pusat (Kuncoro, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi (2010) mengungkapkan bahwa adanya ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dengan pulau-pulau lain atau antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satunya adalah tentang pengelolaan keuangan daerah

dan anggaran daerah. Anggaran daerah (APBD) dalam hal ini menjadi instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah dan menjadi poin penting dalam pengembangan efektivitas dan kapabilitas daerah. Fungsi lainnya adalah sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran dan membantu dalam pengambilan keputusan.

Mengingat kedudukan aspek keuangan daerah yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, maka terdapat beberapa aturan dan prinsip-prinsip penganggaran yang harus ditaati, diantaranya: 1) pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik, 2) adanya kejelasan misi dalam pengelolaan keuangan daerah, 3) desentralisasi dan pelibatan stakeholder, 4) sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, 5) bentuk dan struktur APBD serta anggaran berbasis kinerja, 6) pengembangan sistem informasi keuangan dan transparansi laporan keuangan (Prasetyo, 2005).

Namun pada prakteknya, masih banyak terjadi masalah dalam mengimplementasikan manajemen keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah adanya kecenderungan masih rendahnya kemauan politik untuk meningkatkan transparansi anggaran yang tercermin pada tingginya alokasi belanja aparatur dibandingkan dengan alokasi belanja publik. Selain itu, pada saat penyusunan anggaran berbagai pertanyaan akan muncul. Dengan transparansi anggaran, kebocoran ataupun penyimpangan implementasi kebijakan dapat ditekan, yang dampaknya akan dirasakan pada efisiensi dan efektifitas kebijakan itu sendiri.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) alat komunikasi dengan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Harry Azhar Azis bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber - sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: Belanja Daerah, *Size* dan Temuan Audit. Belanja daerah adalah seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. *Size* pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. *Size* pemerintah daerah diproksikan dengan

jumlah pegawai. Semakin banyak jumlah pegawai maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan Audit BPK merupakan merupakan kasus – kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pembangunan (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Selain itu ada juga yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh Media Kusumawardani (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Media (2012) menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sebagai variabel independen. Faktor-faktor tersebut terdiri dari : (a) Size; (b) Kemakmuran; (c) Ukuran legislatif; dan (d) Lverage. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et all. (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dimana struktur organisasi diproksikan dengan *size* daerah, *wealth*, *functional differentiation*, *age* dan latar belakang pendidikan kepala daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan *municipality debt financing* dan *intergovernmental revenue*.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam

otonomi daerah dan variabel pendapatan asli daerah serta belanja modal dapat dijadikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Adi (2006) dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, dan Belanja pembangunan memberikan dampak positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba usaha daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Komponen PAD tersebut secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping itu memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota setelah diberlakukan otonomi daerah. Sumber penerimaan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta penerimaan lainnya, dan penerimaan pinjaman daerah.

Konsekuensi dari otonomi daerah yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif

laporan keuangan agar bermanfaat untuk pengambilan keputusan yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP Nomor 24 Tahun 2005: 32).

Menurut Halim (2004), salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu, pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*) yang memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap dan cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2006: 34)

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Ada empat macam pola hubungan menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (Halim, 2004: 188), yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

1. Pola Hubungan Instruktif

Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola Hubungan Konsultatif

Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah sudah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Peranan pemerintah pusat semakin berkurang. Mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola Hubungan Delegatif

Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama yaitu *Size* dalam penelitian ini menggunakan Jumlah Pegawai, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian. Perbedaan selanjutnya yaitu periode penelitian ini menggunakan tahun 2013. Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah se-Indonesia, peneliti memutuskan menggunakan objek tersebut dikarenakan ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan mengenai administrasi publik, teori organisasi dan akuntansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui mengenai pengaruh

Belanja Daerah, Temuan Audit dan *Size* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Belanja Daerah, Temuan Audit dan *Size* diambil karena masih kurangnya peneliti yang mengambil variabel tersebut untuk diteliti. Di samping itu, Halacmi (2005) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan metode yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Daerah, Temuan Audit dan *Size* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah jumlah pegawai berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah jumlah pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerintah untuk mengkaji sistem kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat menekan angka kecurangan yang terjadi pada pemerintah daerah terkait kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang di dalami khususnya mengenai penerapan teori akuntansi publik.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP) terutama pada masalah yang terjadi pada kinerja

keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2005 dalam Sudarsana). Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik – baiknya bagi kepentingan masyarakat (Sudarsana, 2013).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana – dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas – batas yang ditentukan peraturan perundang – undangan (Syamsi, 1986 dalam Lidia 2008). Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja

keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan rasio efisiensi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010). Masalah kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia telah banyak diteliti diantaranya dilakukan oleh Hamzah (2009). Walaupun demikian masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas." Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia,2010).

2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), "tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf ke 9 (Revisi 2009), dinyatakan bahwa laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pegawai, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda, beberapa kebutuhan informasi yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Pegawai

Pegawai dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban suatu entitas.

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam laporan realisasi anggaran setidaknya juga menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Agar dapat digunakan oleh pengguna untuk memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.

2.2.2. Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peranan pelaporan keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 21 dan 22 (PP No. 24 tahun 2005) menyatakan bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran keberhasilan/kegagalan suatu organisasi dilakukan dengan cara seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi, 2010):

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan dan evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan dimasa mendatang. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2007). Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal. Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan

kualitas akan pengambilan keputusan sehingga apabila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik dapat diidentifikasi sebagai berikut : pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan kepada masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota DPR bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya (PP RI No. 24 tahun 2005). Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara terus menerus akan menjadi langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan pengukuran kinerja dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi lain yang serupa.

Berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengkomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Selain itu, melalui pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapannya, perbandingan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh beberapa unit kerja organisasi.

Pendapatan daerah berasal dari (a) pajak dan pendapatan dari properti; (b) warisan, donasi, *property recording*; (c) pendapatan dari denda dan hukuman;

(d) tingkat bunga dari kredit yang dipinjam oleh pemerintah daerah; (e) tingkat bunga dari pembayaran tertunda yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah ; (f) tingkat bunga pada sumber keuangan pada akun bank (Stat.gov.pl, 2009).

a. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Nogi, 2003:108). Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
- 3) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Ulum, 2004:277).

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- 2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121).

b. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- 2) Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
- 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- 4) Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada
- 5) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- 6) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Ulum, 2004: 277).

c. Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja

Penilaian laporan kinerja finansial dilihat/diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dimana pengukurannya dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada varian pendapatan. Varian pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan UU no.23 tahun 2004 sumber pendapatan daerah ada 2 yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari Pajak daerah, Restribusi daerah dan Bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.4. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4.1. Definisi Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biayapemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Kusnandar,2011).

Tahun 2013, pemerintah dalam APBN 2013 menargetkan penerimaan sebesar Rp1.507,7 triliun. Penerimaan tersebut mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2007. Sementara, target penerimaan pajak masih menjadi target penerimaan terbesar, yakni mencapai Rp1.031,7 triliun atau sekitar 68,4% dari total penerimaan negara. Namun demikian, meskipun penerimaan negara terus naik dari tahun ke tahun, apabila kita bedah lebih lanjut, ternyata kenaikan penerimaan dalam APBN tersebut hanya berdampak signifikan pada beberapa pos saja, yakni belanja pegawai, subsidi dan membayar cicilan pokok hutang beserta bunganya. Sementara itu,

pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur kurang lebih hanya mencapai 10% dari belanja negara. Bahkan apabila dibandingkan dengan belanja subsidi, alokasi untuk pembangunan infrastruktur tidak sampai 60%. Fakta ini menunjukkan masih tingginya beban subsidi pada APBN kita. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan perpajakan belum efektif menopang laju pembangunan, karena sebagian besar masih ditunjukkan untuk belanja non infrastruktur (Depkeu).

Penjelasan di atas semakin memberikan kejelasan bahwa belum ada komitmen yang jelas dari pemerintah untuk mendorong biaya belanja modal di daerah. Besaran anggaran untuk pembangunan fisik masih begitu minim, dan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sekali lagi hal yang menjadi pekerjaan rumah terbesar dari pemerintah adalah memperbesar porsi belanja modal yang mempunyai dampak secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Syaiful (2006) dalam Kusnandar dan Dodik menyatakan bahwa Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

Syaiful (2006) dalam Yovita (2011) mengategorikan Belanja Modal menjadi lima kategori yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Selama ini alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja rutin. Alokasi untuk belanja modal masih kalah dengan alokasi belanja pegawai dan belanja rutin, hal ini jelas berdampak pada pembangunan di daerah karena dana yang terserap untuk mendukung pembangunan tersebut masih belum optimal. Selain mengenai alokasi belanja modal yang belum mencapai nilai optimal, realisasi dari belanja modal itu sendiri juga masih belum mencapai nilai yang ditargetkan oleh pemerintah.

Melihat fenomena-fenomena yang diuraikan di atas maka pemerintah sudah saatnya mengubah alokasi belanja daerah yang semula didominasi oleh belanja pegawai dan rutin menjadi belanja modal yang lebih dominan. Alokasi belanja modal tersebut juga harus tetap memperhatikan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Pengalokasian belanja-belanja daerah harus tetap memperhatikan

kemampuan daerah dalam menggali potensi daerah yang pada nantinya akan menjadi penopang dari belanja-belanja daerah.

Belanja modal sendiri pada nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di daerah yang bersifat produktif. Alokasi belanja modal jika semakin diperbanyak maka daerah secara tidak langsung telah berinvestasi yang besar bagi daerah tersebut. Manfaat yang akan diperoleh dari investasi tersebut menjadi manfaat yang sifatnya jangka panjang. Mengingat bahwa belanja modal bertujuan untuk menambah aset tetap maka belanja modal didapatkan dari penjumlahan belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja fisik lainnya.

2.5. Temuan Audit

2.5.1. Definisi Audit

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Prmono,2008). Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Audit dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Audit eksternal juga disebut sebagai audit independen karena dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dari manajemen perusahaan kliennya.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan di suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Bernstein (2000), menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja pemerintah daerah dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya/semakin tidak efisien kinerja pemerintah daerah tersebut.

2.5.2. Tipe-tipe Audit

Audit pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

1. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*).

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal terhadap laporan keuangan *auditee* untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan kantor pelayanan pajak.

2. Audit kepatuhan (*compliance audit*).

Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan dapat dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal.

3. Audit operasional (*operational audit*).

Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematis aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu.

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat. Jadi, audit yang dilakukan dalam audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit atau operational audit, sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Istilah lain untuk performance audit adalah Value for Money Audit atau disingkat 3E's audit (*economy, efficiency and effectiveness audit*). Penekanan kegiatan audit pada ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu organisasi

memberikan ciri khusus yang membedakan audit kinerja dengan audit jenis lainnya. (Ritongan. 2013)

Optimalisasi audit kinerja instansi pemerintah oleh: h.rahmansyah ritonga, se.ak. M.ap

2.5.3. Tujuan audit operasional adalah untuk:

1. Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen
 2. Mengidentifikasi peluang dan
 3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
- Pihak-pihak yang mungkin meminta dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

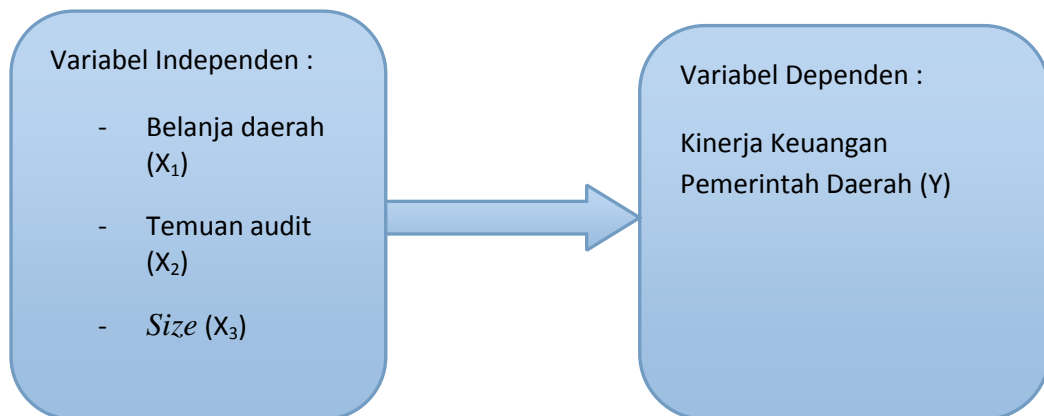
2.6. Size (Ukuran)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di suatu daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (Wikipedia.com, 2009). DPR memiliki peranan yang besar dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya sehingga dapat mencapai kinerja yang diinginkan. Patrick, dikutip dalam Hendro (2010), menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. Ukuran (*size*) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut (Suhardjanto, et. all., dikutip dalam Hendro, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Schmalensee (1989) menemukan bahwa

entitas yang lebih besar memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada entitas yang lebih kecil. *Size* di dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah pegawai di tiap – tiap provinsi di Indonesia. Semakin banyaknya jumlah pegawai maka semakin tidak efisien kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.7. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja daerah, temuan audit dan *size* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

Gambar diatas memperlihatkan pengaruh antara Belanja Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Pegawai terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, di mana Belanja Daerah sebagai X_1 , Temuan Audit sebagai X_2 , dan *Size* sebagai X_3 merupakan Variabel Independen terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Dependen.

2.8. Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah belanja daerah, temuan audit dan jumlah pegawai berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

1. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi nilai kinerja Pemerintah Daerah. Dari uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah menggambarkan semakin buruknya/semakin tidak efisien Kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Bernstein (2000) menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh *Size* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah pegawai merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah, 2009). Jumlah pegawai diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan pelaksanaan tugas, termasuk tugas penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan

keuangan daerah. Dengan demikian, semakin kecil jumlah pegawai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah pegawai akan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Size* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan belanja daerah, temuan audit dan jumlah pegawai terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dan Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia pada tahun 2013. Total populasi adalah 333 kabupaten/kota di bawah 33 provinsi (bpk.go.id, 2013). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *judgement –sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Jogiyanto, 2005). Kriteria-kriteria itu adalah: (1) sampel adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. (2) pada sampel tersebut tersedia data-data non-keuangan seperti jumlah pegawai.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota tahun 2013 serta data non keuangan, seperti jumlah anggota DPRD. Alasan penggunaan data sekunder bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama yaitu variabel dependen dan variabel independen. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

3.4.1. Variabel Dependen

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur menggunakan teori rasio efisiensi. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien biaya – biaya yang dikeluarkan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini akan menggambarkan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan yang diimbangi dengan biaya yang memenuhi batas kewajaran.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus (Abdul Halim, 2007) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari belanja daerah, temuan audit, jumlah pegawai.

1. Belanja daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diukur dari tingkat kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah akan menunjukkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dan tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai dari belanja daerah dapat diperoleh dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi belanja daerah di suatu daerah menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak efisien.

2. Temuan Audit

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Pramono, 2008). Audit dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri

dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nilai dari temuan audit dapat di peroleh di website resmi BPK. Pengukuran temuan audit dapat dilihat dari semakin banyaknya tingkat temuan audit pemerintah daerah maka menunjukkan tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak baik. Pengukuran temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan opini audit.

Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini audit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan opini audit Wajar Dengan Pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing, auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Opini wajar tanpa pengecualian dalam penelitian ini dituliskan dengan angka 0 (nol). Opini wajar dengan pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu

penyimpangan/kurang lengkap pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Opini wajar dengan pengecualian dalam penelitian ini dituliskan dengan angka 1 (satu).

3. Size

Size di dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah pegawai. Jumlah pegawai merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah, 2009). Sama halnya dengan jumlah pegawai, banyaknya jumlah pegawai diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Jumlah pegawai yang kecil diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Data mengenai jumlah pegawai dapat diperoleh di website bps.go.id.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan alat uji regresi linier berganda.

3.5.1. Analisis Deskriptif

Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari alat teknik atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan

kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kegiatan- kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan pengumpulan data, pengelompokan data, penentuan nilai dan fungsi statistik serta pembuatan grafik, diagram dan gambar. Statistika deskriptif ini merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya kedalam bentuk yang siap dianalisis. Adapun analisis statistika deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya.

3.5.2. Analisis Inferensial

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Pengukuran dengan menggunakan analisis regresi berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolenieritas dan uji autokorelasi sebagai berikut ini:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal. Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen mempunyai nilai signifikansi lebih dari 5%. Data penelitian yang baik adalah berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu program SPSS.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Model Regresi

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program SPSS. Kriteria pengujiannya adalah:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak, yaitu apabila $p \text{ value} > 0,05$ atau bila nilai signifikan lebih dari nilai *alpha* 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak untuk digunakan dalam penelitian.

2. H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu apabila $p \text{ value} > 0,05$ atau bila nilai signifikan kurang dari nilai $alpha$ 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

b) Pengujian Ketetapan Perkiraan (R^2)

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik menggunakan nilai *adjusted* R^2 .

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Temuan audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Jumlah pegawai berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil simpulan di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran kepada pemerintah di Indonesia untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
2. Penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambahkan variabel – variabel lain yang di duga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rekomendasi lain yaitu menggunakan proksi lain untuk variabel dependen sehingga dapat menginterpretasikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi IX* Padang 23-26 Agustus 2006.
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar 26-28 Juli 2007.
- <http://endadaniel.wordpress.com/2011/06/20/analisis-dampak-desentralisasi-pajak-bumi-bangunan-dan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-terhadap-penerimaan-daerah-dalam-anggaran-penerimaan-dan-pendapatan-daerah-kota-gorontalo>. diakses pada 19 Desember 2013 pkl 03:58.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halachmi, Arie. 2005. *Performance measurement is only way of managing performance*. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54: 502-516.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1).
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi :3, Salemba Empat*. Jakarta.

Hamzah, Ardi. 2007. *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*, Konferensi Penelitian, Jatim.

Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri. 2009. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatera Barat*. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.

Harahap, Alfian. 2010. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar 26-28 Juli 2007.

<http://depdagri.go.id>. Diakses pada 18 Juli 2013, pkl 10:47

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel>. Diakses pada 1 Desember 2013, pkl 22:14

http://panetir.wordpress.com/2012/12/30/pengaruh_DAU_dan_PAD_terhadap_prediksi_belanja_modal_studi_empiris_pada_pemerintah_kabupatenkota_di_provinsi_Aceh_bab_1/. Diakses pada 17 November 2013 pkl 20:19

<http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 3 November 2013, pkl 07:43

http://www.setkab.go.id/APBN_2014.htm. Diakses pada 28 November pkl 10:53

Indraningrum, Try. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Jawa Pos. 2010. Pemerintah akan Audit Pelaksanaan Kebijakan dan APBD yang Tidak Efektif. 30 Juli

Kusnandar. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia.

Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Negeri Semarang.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Manar, Dzunuwanus Ghulam. 2008. *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Sumber Daya Manusia di antara Harapan dan Kenyataan*. Disampaikan pada Studium General 2008 Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 18 November.
- Mariani, Lidia. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah. (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat).
- Moisio, Antti. 2002. *Essays on Finnish Municipal Finance and Intergovernmental Grants*. Helsinki: Government Institute For Economic Research.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Paujiah, Sri Puji. __. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya). Universitas siliwangi.
- Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Yudistisia.
- Peraturan Pemerinah RI No. 24 tahun 2005 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) tentang Laporan Keuangan.
- Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symetrical? Evidence from Pennsylvania Country Government in an Era of Retrenchment. *National Tax Journal*, Vol. 47 No. 4.
- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerinta Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Universitas Diponegoro.
- Suhardjanto, D, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristic: Evidence From Indonesian Municipalities*. Journal Public Policy January 2010.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.

- Sularso, Havid dan Y.E Restianto. __. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Universitas Jenderal Soedirman.
- Suwarno, Yogi. 2009. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Makalah disajikan dalam DIKLATPIM IV BKN, Cipanas, 10 Agustus.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 1. 2:142-155.
- Ulum, Bahrul Rusydi. 2010. *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Undang – undang No. 23 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Daerah
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- Undang – undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31.
- Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali). *National Conference UKWMS Surabaya*.
- Wandira, Arbie Gugus. 2012. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Wood, L. 1998. *Local Government Dollars & Sense* (Rancho Palos Verdes, CA.: Training Shoppe).
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008 – 2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. UNDIP.

Lampiran 1
Tabulasi Data Penelitian

Tabulasi Data Penelitian

No	PROVINSI	Belanja Daerah	Temuan Audit	Jumlah Pegawai	Kinerja
1	Aceh	10149028	0	9160	1,109
2	Sumatera Utara	6746400	0	245690	1,031
3	Sumatera Barat	1619578	0	1951	0,961
4	Jambi	2795338	0	10464	0,691
5	Bengkulu	1584856	0	7005	0,869
6	Lampung	3527064	0	8080	0,857
7	Jakarta	38301502	1	71445	1,076
8	Jawa Barat	14002468	0	12708	0,858
9	Jawa Tengah	5396012	0	15926	0,693
10	DIY	2009916	0	7649	0,755
11	Jawa Timur	12670706	0	399845	0,797
12	Kalimantan Barat	11309159	0	5827	0,889
13	Kalimantan Tengah	23442752	1	2447	0,959
14	Kalimantan Selatan	1626019	0	8769	0,57
15	Kalimantan Timur	6087437	0	7235	0,663
16	Sulawesi Utara	24499	0	2465	0,759
17	Sulawesi Tengah	1769414	1	5379	0,875
18	Sulawesi Selatan	4256178	0	6425	0,901
19	Sulawesi Tenggara	148110	0	9142	0,694
20	Bali	1598130	0	5609	0,781
21	NTT	5835220	1	845	1,187
22	Maluku	6837675	0	6460	0,968
23	Papua	9485054	1	765	1,132
24	Maluku Utara	7938552	0	865	0,871
25	Banten	8642860	1	876	1,067
26	Bangka Belitung	664286	0	3829	0,619
27	Gorontalo	1271021	0	2453	0,914
28	Papua Barat	3736985	0	34222	0,898
	Maksimum	38301502	1	399845	1,187
	Minimum	24499	0	765	0,570
	Rata-rata	6909865	0,214	31912	0,873
	Simpangan baku	8072089	0,42	85896	0,160

Lampiran 2

Output SPSS

Deskriptif

Statistics

		Belanja_Daerah	Jumlah_Pegawai	KINERJA
N	Valid	28	28	28
	Missing	0	0	0
Mean		6909864.9643	31912.0000	.8730
Std. Deviation		8072089.45317	85896.48142	.16013
Minimum		24499.00	765.00	.57
Maximum		38301502.00	399845.00	1.19

Temuan_Audit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wajar tanpa pengecualian	22	78.6	78.6	78.6
	Wajar dengan pengecualian	6	21.4	21.4	100.0
Total		28	100.0	100.0	

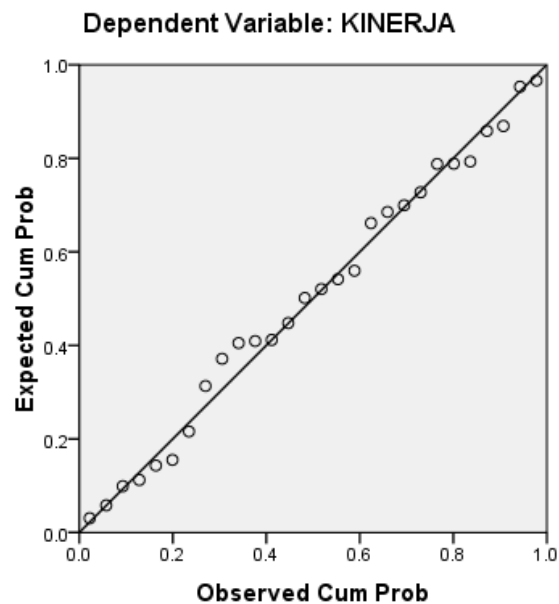
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11893271
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.073
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.413
Asymp. Sig. (2-tailed)		.996

a. Test distribution is Normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



UJI AUTOKORELASI

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,02175
Cases < Test Value	14
Cases >= Test Value	14
Total Cases	28
Number of Runs	11
Z	-1,348
Asymp. Sig. (2-tailed)	,178

a. Median

UJI MULTIKOLENIERITAS

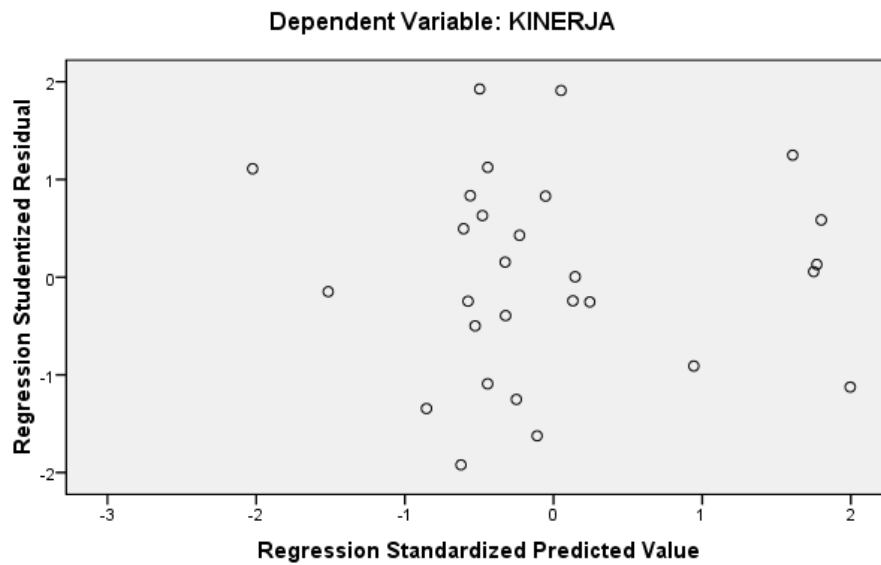
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.355	.265		1.343	.192		
Belanja_Daerah	.091	.043	.374	2.140	.043	.755	1.325
Temuan_Audit	.158	.069	.413	2.296	.031	.711	1.407
Jumlah_Pegawai	-.030	.042	-.122	-.711	.484	.780	1.283

a. Dependent Variable: KINERJA

UJI HETEROKESDASITAS

Scatterplot



UJI GLEJSER

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.110	.155		.708	.486
Belanja_Daerah	-.005	.025	-.048	-.205	.840
Temuan_Audit	-.018	.040	-.106	-.442	.663
Jumlah_Pegawai	.006	.024	.053	.233	.818

a. Dependent Variable: Abs_res

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.355	.265		1.343	.192
Belanja_Daerah	.091	.043	.374	2.140	.043
Temuan_Audit	.158	.069	.413	2.296	.031
Jumlah_Pegawai	-.030	.042	-.122	-.711	.484

a. Dependent Variable: KINERJA

UJI R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	.448	.379	.12615

a. Predictors: (Constant), Jumlah_Pegawai, Belanja_Daerah, Temuan_Audit

UJI F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.310	3	.103	6.503	.002 ^a
	Residual	.382	24	.016		
	Total	.692	27			

a. Predictors: (Constant), Jumlah_Pegawai, Belanja_Daerah, Temuan_Audit

b. Dependent Variable: KINERJA

UJI T**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.355	.265		1.343	.192
Belanja_Daerah	.091	.043	.374	2.140	.043
Temuan_Audit	.158	.069	.413	2.296	.031
Jumlah_Pegawai	-.030	.042	-.122	-.711	.484

a. Dependent Variable: KINERJA

UJI r**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	.804	.034		23.489	.000			
Belanja_Daerah	3.424E-9	.000	.173	.872	.392	.441	.175	.141
Temuan_Audit	.193	.074	.505	2.599	.016	.586	.469	.420
Jumlah_Pegawai	1.071E-7	.000	.057	.334	.741	.039	.068	.054

a. Dependent Variable: KINERJA

